JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN

Halaman Jurnal: https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/ekonomika
Halaman UTAMA Jurnal : https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, IPM, Panjang Jalan Terhadap Kemiskinan di Papua

Anita Kusumawati[1], Lilis Siti Badriah[2], Agus Arifin[3]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Magister Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
e-mail: anita.kusumawati@mhs.unsoed.ac.id[1], lilis.badriah@unsoed.ac.id[2], agus.arifin@unsoed.ac.id[3]

Abstract: *Poverty is an important problem for each country, both developed and developing countries, including Indonesia. The government continues to strive to reduce poverty levels through various mechanisms such as fiscal decentralization, human capital development and infrastructure development. In Indonesia, Papua is an area that has the highest poverty conditions in Indonesia. This research uses panel data consisting of the provinces of Papua and West Papua for the period 2008-2022. The analysis technique used is panel data regression. The results of the analysis show that special autonomy funds have a positive effect on poverty, HDI and regional spending have a negative effect on poverty. DBH, DAU, DAK, and road length have no effect on poverty levels. The implication of this research is the need to optimize the realization of transfer funds and increase infrastructure development so that it can reduce poverty levels.*

Keywords*: Fiskal Decentralization, HDI, Regional Expenditure, Long Road, Poverty.*

Abstrak: Kemiskinan masalah penting bagi setiap negara baik negara maju maupun berkembang termasuk di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai mekanisme seperti desentralisasi fiskal, pembangunan modal manusia maupun pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, Papua merupakan daerah yang memiliki kondisi kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari provinsi papua dan papua barat dengan kurun waktu 2008-2022. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil analisis menunjukan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan, IPM dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. DBH, DAU, DAK, dan panjang jalan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Implikasi pada penelitian ini adalah perlunya optimalisasi realisasi dana transfer dan peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, IPM, Panjang Jalan dan Belanja Daerah, Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan yang penting untuk diatasi oleh seluruh negara di dunia. Hal ini karena kemiskina menjadi permasalahan global, nasional, bahkan lokal sehingga memerlukan perhatian banyak pihak dan dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Bahkan dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) penurunan tingkat kemiskinan menjadi tujuan pertama dan utama (Solomon, 2023). Setiap negara berkembang memiliki masalah kemiskinan yang reltif tinggi termasuk di Indonesia. Berdasarkan pernyataan diatas, berikut dibawah ini adalah data jumlah penduduk miskin di Indonesia (Juta Jiwa) di Indonesia dari tahun 2019-2023.

Received: Oktober 09, 2024; Revised: November 23, 2024;Accepted: Desember 07, 2024; Published: Desember 09, 2024

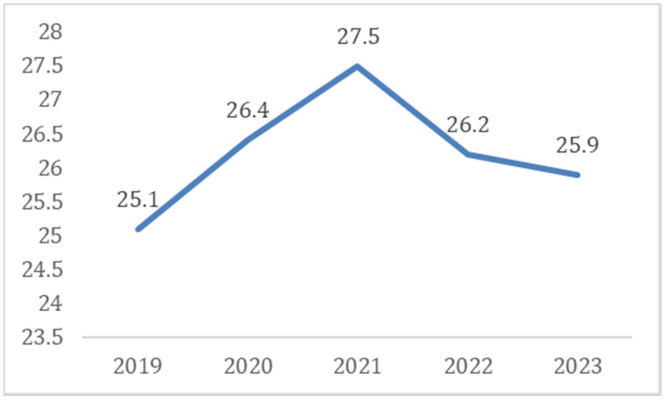

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Juta Jiwa), Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 1. diketahui bahwa tingka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini disebabkan salah satunya oleh pandemi covid-19. Seiring berjalan waktu tingkat kemiskinan menurun hingga tahun 2023 seiring dengan membaiknya kegiatan perekonomian. Meskipun mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin sebanyak 25,9 juta mash tergolong tinggi untuk golongan negara berkembang. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kondisi yang berbeda-beda di setiap pulaunya. Kondisi yang berbeda ini akan menimbulkan suatu ketertinggalan bagi daerah yang rendah dalam kegiatan pembangunan. Berikut merupakan kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan pulau:

Tabel 1. Kondisi Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Pulau (Persen), 2019-2023

No	Pulau	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Sumatera	9,79	9,22	9,00
2.	Jawa	9,30	8,59	8,40
3.	Kalimantan	6,21	5,92	5,73
4.	Sulawesi	11,35	11,10	11,09
5.	Bali, NTT, NTB, Maluku	12,88	12,10	12,19
6.	Papua	24,35	23,95	23,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 1. menunjukan bahwa Pulau Papua menjadi kepulauan dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan dengan kepulauan lainnya meskipun dari tahun 2021-2023 selalu mengalami penurunan dalam tingkat kemiskinan. Setiap tahunnya kondisi kemiskinan Papua dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Pulau

Sulawesi. Hal ini menunjukan bahwa Papua merupakan pulau yang paling tertinggal dalam hal kemiskinan.

Luasnya wilayah Indonesia mengakibatkan sulit tercapainya pemerataan pembangunan disetiap pulaunya. Dengan adanya perbedaan antar daerah maka pelaksanaan kebijakan yang dilakukan disetiap daerahnya berbeda satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan asas otonomi daerah. Otonomi daerah akan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada. Namun masih terdapat koordinasi dan pengawasan dari pusat kepada daerah (Granado et al., 2018).

Otonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di tingkat daerah sampai kepada pengaturan keuangan atau ranah fiskal yang biasa disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini akan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur keuangan sesuai dengan permasalahan di masing-masing daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Permai et al., (2021) dan Siburian (2022) menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menangani masalah yang berbeda-beda satu sama lain (Sambanis & Milanovic, 2014).

Desentralisasi fiskal yang mendasari bahwa keuangan ditingkat daerah diatur berdasarkan wewenang daerah sendiri (Ghozali & Khoirunurrofik, 2020). Hubungan antara keuangan pusat dan daerah diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. UU ini mengatur mengenai keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi fiskal yang didalam nya mengatur dana transfer ke daerah (TKD). Transfer ke Daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus diimplementasikan dengan pemberian Dana Otonomi Khusus bagi daerah tertentu seperti Provinsi Aceh dan Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain dana otonomi khusus, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan dana perimbangan berupa DBH, DAU, dan DAK yang kemudian digunakan untuk Belanja Daerah. Berikut merupakan tabel yang menunjukan TKD dan belanja di Papua:

Tabel 2. Transfer Ke Daerah (TKD) dan Belanja Daerah Papua (Milliar Rupiah), 2018-2022

No	Provinsi	Jenis Belanja	Tahun	
			2021	2022
1	Papua	DBH	8020,85	13186,89
		DAU	8674,68	13421,68
		DAK	7999,97	12607,00
		Dana Otsus	7911,84	14859,61
		Belanja Daerah	3792,66	11546,21
2	Papua Barat	DBH	4008,94	6947,07
		DAU	3947,79	9269,30
		DAK	4018,84	9746,95
		Dana Otsus	4015,25	8040,53
		Belanja Daerah	2306,84	7536,64

Sumber : Kementerian Keuangan, 2023

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi yang tertinggal. Maka dari itu, dua provinsi ini memperoleh dana otonomi khusu yang pemanfaatannnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejaheraan rakyat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi jika dilihat pada tabel 1. diketahui bahwa Pulau Papuan masih menjadi pulau dengan kemiskinan tertinggi dibandingkan pulau lainnya meskipun telah memperoleh tambahan dana transfer berupa dana otonomi khusus.

Penelitian Hanif et al., (2014) dan Khusaini, (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dari pendapatan dan belanja pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukan bahwa keuangan daerah memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu intrumen fiskal adalah dana transfer ke daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail & Hakim, (2014), Manduapessy (2020), Gumelar, (2021), Nany et al., (2022), Mardiansyah et al, (2023), menunjukan bahwa DBH, DAU, dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa DBH, DAU, DAK ketika ditingkatkan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain DBH, DAU, dan DAK dana transfer ke daerah juga terdiri dari dana desa.

Dana transfer ke daerah tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan asas desentralisasi fiskal. Dimana belanja daerah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang berwenang denga tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh Lucia et al., (2023) menunjukan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap

penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Hal ini menunjukan bahwa ketika belanja daerah ditingkatkan maka kemiskinan akan menurun.

Selain berkaitan dengan kapital yang digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat, jika dilihat dari kualitas sumber daya manusianya Pulau Papua mempunyai kondisi IPM yang relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah di Kawasan Indonesia Timur pada khususnya. Berikut dibawah ini adalah rata-rata data IPM di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2017-2022.

Berdasarkan Gambar 2. diketahui bahwa jika dibandingkan dengan provinsi di Kawasan Timur Indonesia, Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai nilai IPM yang paling rendah. Hal ini berarti bahwa kualitas modal manusia di dua provinsi tersebut belum mengalami peningkatan. Kristin (2018) menjelaskan bahwa IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Semakin meningkatnya tiga komponen IPM tersebut maka akan semakin meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga mampu menurunkan tingkat kemisikinan di Pulau Papua.

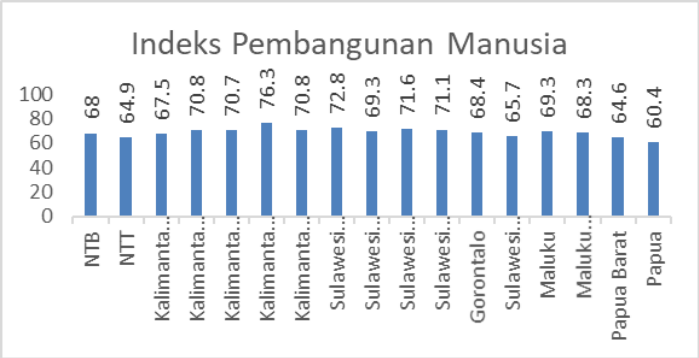

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia, 2017-2022

Selain modal manusia, pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan maupun sarana prasarana publik berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Andrianto & Iskandar, (2019) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Semakin banyak pembangunan infrastruktur, maka akan semakin meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut dibawah ini adalah panjang jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diakses demi mendukung kegiatan perekonomian.

Kemiskinan masih menjadi masalah besar di Papua. Berdasarkan Tabel 1. menunjukan bahwa Papua merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi diantara daerah lain. Padahal Papua diberikan dana transfer ke daerah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dikarenakan terdapat penambahan dana alokasi khusus yang tidak diberikan kepada daerah lain. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, IPM dan Panjang Jalan kemiskinan di Papua.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi yang dialami oleh setiap individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi taraf hidup layak. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup layak atau standar hidup minimum (Mudrajad, 2004). Teori kemiskinan dikemukakan oleh Regnar Nurske dalam bukunya *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Country* pada tahun 1953 (Todaro & Smith, 2014). Lingkaran kemiskinan adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu kemiskinan dipengaruhi oleh kekuatan yang saling mempengaruhi sehingga sulit dari keadaan tersebut. Berikut merupakan Gambar yang menunjukan lingkaran kemiskinan:

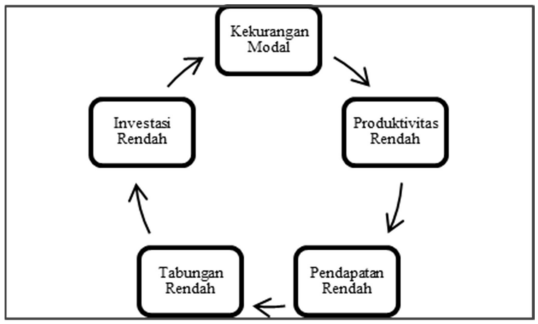

Gambar 2. Lingkaran Kemiskinan
Sumber: Todaro & Smith 2014

Berdasarkan teori lingkaran setan kemiskinan *(vicious circle of poverty)* menurut Nurkse penyebab kemiskinan dikarenakan oleh adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (Todaro & Smith, 2014).

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan atas dasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, lalu diperbarahuri dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan keleluasaan setiap daerah dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerah (Tobing, 2021). Berkaitan dengan otonomi daerah maka kebijakan-kebiijakan di daerah akan diambil alih oleh pemerintah daerah setempat yang memahami kondisi daerah masing-masing. Salah satu kebijakan yang diatur secara mandiri adalah mengenai keuangan daerah yang sering disebut dengan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah terjadinya menurunkan ketimpangan antar daerah. Hal ini karena masing-masing daerah mempunyai kondisi yang berbeda sehingga dibutuhkan anggaran yang berbeda-beda pula (Hastuti, 2018).

Modal Manusia, Pembangunan Infrastruktur dan Kemiskinan

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan kualitas manusia dan kapital (modal) yang tinggi. Semakin tinggi tingkat modal manusia, maka akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, kesehatan maupun standar hidup suatu masyarakat. Tingginya kualitas pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup dalam suatu masyarakat akan mendorong masyarakat tersebut untuk mencapai pendapatan yang tinggi sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, tingginya modal manusia harus diiringi dengan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai komponen penggerak kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin baik kualitas infrastruktur suatu daerah maka akan mampu menggerakkan perekonomian dan menekan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2014).Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan meneliti angka. Hasil analisis berdasarkan statistika akan dijelaskan sebagai bahan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang bersumber dari BPS dan terdiri dari provinsi papua dan papua barat dalam kurun waktu 2008-2022. Penelitian ini akan menggunakan metode regresi data panel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Pemilihan Model

1) Uji Chow

Uji chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih CEM dan FEM. Berikut merupakan table hasil uji chow:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3,592082	(1,21)	0,0719
Cross-section Chi-square	4,737062	1	0,0295

Sumber: Eviews, diolah 2024

Berdasarkan Tabel 3. menunjukan bahwa nilai probability Chi-Square <0,05. Hal ini menunjukan bahwa model yang dipilih adalah model FEM.

2) Uji Hausman

Uji chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih CEM dan FEM. Berikut merupakan table hasil uji chow:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	81,899141	1	0.0000

Sumber: Eviews, diolah 2024

Berdasarkan Tabel 4. menunjukan bahwa nilai probability <0,05. Hal ini menunjukan bahwa model yang dipilih adalah model FEM.

b. Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menganalisis data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan JB Test. Berikut merupakan hasil analisis uji normalitas:

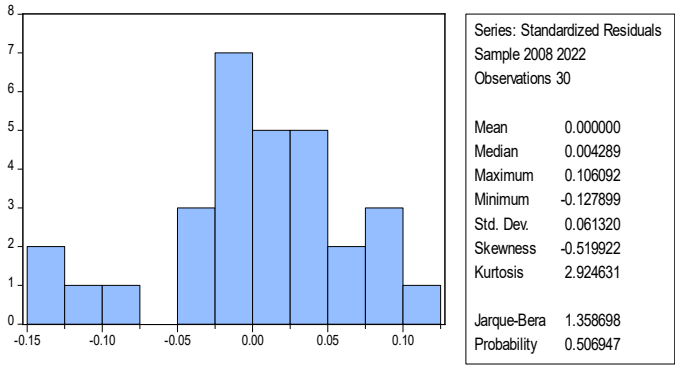

Gambar 4. Uji Normalitas

Sumber: Eviews, diolah 2024

Hasil analisis menunjukan pada Gambar menunjukan bahwa nilai probability Jarque-Bera adalah 0,506 > 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa data terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolienaritas

Berdasarkan hasil analisis berikut merupakan table yang menunjukan uji multikol:

Tabel 5. Uji Multikolienaritas

	LNDBH	LNDAU	LNDAK	LNOTSUS	LNIPM	LNPJ	LNBD
LNDBH	1.000000	0.407529	0.418965	0.745589	0.741244	0.568211	0.253236
LNDAU	0.407529	1.000000	0.458926	0.649365	0.785950	0.000696	0.208048
LNDAK	0.418965	0.458926	1.000000	0.436531	0.624781	0.443584	0.243631
LNOTSUS	0.745589	0.649365	0.436531	1.000000	0.746866	0.373039	0.315357
LNIPM	0.741244	0.785950	0.624781	0.746866	1.000000	0.376290	0.307207
LNPJ	0.568211	0.000696	0.443584	0.373039	0.376290	1.000000	0.427377
LNBD	0.253236	0.208048	0.243631	0.315357	0.307207	0.427377	1.000000

Sumber: Eviews, diolah 2024

Berdasarkan Tabel 5. Menunjukan bahwa korelasi setiap variabel tidak melebihi 0,09. Hal ini memberikan arti bahwa multikolienaritas dapat ditoleransi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji park. Berikut merupakan Tabel yang menunjukan hasil uji gletjer:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002387	0.035489	0.067255	0.9470
LNDBH	0.000389	0.000555	0.701984	0.4901
LNDAU	-0.001214	0.001235	-0.983266	0.3362
LNDAK	-0.000310	0.000439	-0.705842	0.4877
LNOTSUS	-0.001063	0.001140	-0.932317	0.3613
LNIPM	0.002795	0.002794	1.000358	0.3280
LNPJ	-0.005402	0.007934	-0.680862	0.5031
LNBD	2.21E-05	0.000486	0.045388	0.9642

Sumber: Eviews, diolah 2024

Berdasarkan Tabel 6. hasil analisis menunjukan bahwa nilai probabilitas t-statistik pada uji park secara keseluruhan berada pada >0,05. Hal ini menunjukan bahwa heteroskedastisitas dapat ditoleransi.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji DW. Berikut merupakan tabel hasil analisis:

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Kriteria	Nilai
Durbin-Watson stat	1.380992
DL	0,9256
DU	2,0343

Sumber: Eviews, diolah 2024

Berdasaran hasil analisis dapat diputuskan bahwa kriteria uji autokorelasi berada pada kriteria dl < d < du. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan yang dapat disimpulkan adalah tidak ada keputusan. Hal ini menunjukan bahwa autokorelasi masih dapat ditoleransi.

c. Hasil Regresi Data Panel

Berikut merupakan hasil analisis regresi data panel dengan memilih FEM:

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.77805	1.529290	7.701646	0.0000
LNDBH	0.039718	0.033793	1.175331	0.2530
LNDAU	0.095426	0.053018	1.799870	0.0863
LNDAK	0.020501	0.018848	1.087698	0.2891
LNOTSUS	0.127339	0.054768	2.325077	0.0302
LNIPM	-1.345880	0.432075	-3.114924	0.0052
LNPJ	0.056586	0.029240	1.935252	0.0665
LNBD	-0.385510	0.141233	-2.729601	0.0126
R-squared	0.833230	Mean dependent var		3.324118
Adjusted R-squared	0.769699	S.D. dependent var		0.150157
S.E. of regression	0.072060	Akaike info criterion		-2.179318
Sum squared resid	0.109045	Schwarz criterion		-1.758959
Log likelihood	41.68977	Hannan-Quinn criter.		-2.044842
F-statistic	13.11524	Durbin-Watson stat		1.380992
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7. berikut merupakan model regresi pada penelitian ini:

$$Y = 11,778 + 0,039\ DBH_{it} + 0,095\ DAU_{it} + 0,020\ DAK_{it} + 0,127\ OTSUS_{it} - 1,345\ IPM_{it} + 0,056\ PJ_{it} - 0,385\ BD_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7. berikut merupakan interpretasi hasil:

1. Koefisien β_1 adalah 11,778 memiliki arti bahwa jika DBH, DAU, DAK, Otsus, IPM, Panjang Jalan, dan Belanja Daerah nol maka kemiskinan 11,778 persen.
2. DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua.
3. DAU tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua
4. DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua
5. Dana Otonomi Khusus memiliki korfisien 0,127 memiliki arti bahwa jika dana otsus dinaikan 1 persen maka kemiskinan di papua akan naik 0,127 persen.
6. Indeks pembangunan manusia memiliki koefisien -1,345 memiliki arti bahwa jika indeks pembangunan manusia dinaikan 1 persen maka kemiskinan di papua akan turun 1,345 persen.
7. Panjang jalan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua
8. Belanja daerah memiliki koefisien -0,385 memiliki arti bahwa jika belanja daerah dinaikan 1 persen maka kemiskinan di papua akan turun 0,385 persen.

d. Uji F

Uji F merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dari variabel independent terhadap variabel dependent. Berdasarkan Tabel 7. Menunjukan bahwa nilai probabilitas pada f-statistik adalah 0,000. Hal ini menunjukan bahwa nilai probabilitas 0,000<0,05 dan dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel DBH, DAU, DAK, Otsus, IPM, Panjang Jalan, dan Belanja Daerah berepengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Papua.

e. Uji t

Uji t merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antar variabel independent terhadap variabel dependent. Berikut merupakan tabel yang menunjukan uji t:

Tabel 8. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.77805	1.529290	7.701646	0.0000
LNDBH	0.039718	0.033793	1.175331	0.2530
LNDAU	0.095426	0.053018	1.799870	0.0863
LNDAK	0.020501	0.018848	1.087698	0.2891
LNOTSUS	0.127339	0.054768	2.325077	0.0302
LNIPM	-1.345880	0.432075	-3.114924	0.0052
LNPJ	0.056586	0.029240	1.935252	0.0665
LNBD	-0.385510	0.141233	-2.729601	0.0126

Sumber: Eviews, diolah 2023

Berikut merupakan interpretasi dari setiap variabel:

1. DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua.
2. DAU tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua
3. DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua
4. Dana Otonomi Khusus memiliki korfisien 0,127 dan nilai signifikansi 0,0302 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa dana otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua.
5. Indeks pembangunan manusia memiliki koefisien -1,345 dan nilai signifikansi 0,0052 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua.
6. Panjang jalan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua
7. Belanja daerah memiliki koefisien -0,385 dan nilai signifikansi 0,0126 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua.

f. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dianalisis dengan Adjusted R-Square. Berdasarkan Tabel 7. menunjukan bahwa nilai Adjusted R-Square 0,769. Hal ini menunjukan bahwa variabel DBH, DAU, DAK, Otsus, IPM, Panjang Jalan, dan Belanja Daerah dapat menjelaskan kepada variabel kemiskinan sebesar 0,769 atau 76,9 persen. Sisanya 23,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. PEMBAHASAN

a. Pengaruh DBH Terhadap Kemiskinan di Papua

Hasil analisis menunjukan bahwa nilai koefisien DBH adalah 0,253 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua. Dana bagi hasil merupakan salah satu dari dana perimbangan yang ditransfer dari pusat kepada daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasu et al., (2019) menunjukan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Manado.

DBH tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan oleh pelaksanaan penggunaan DBH tidak leluasa. DBH memberikan ketidakpastian keuangan kepada daerah dikarenakan dalam perkiraan realisasi ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemumut pajak. Hal ini memberkan ketidakleluasaan dalam menggunakan DBH. Dapat dikatakan bahwa pengalokasian DBH kurang berdampak kepada penurunan kemiskinan. Pemerintah harus melaksanakan pengelolaan dana berdasarkan asas otonomi daerah tanpa ada kebocoran. Sehingga hal ini akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

b. Pengaruh DAU Terhadap Kemiskinan di Papua

Hasil analisis menunjukan bahwa DAU memiliki nilai probabilitas 0,086 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Kondisi ini menunjukan bahwa DAU tidak dapat secara langsung untuk menangani kemiskinan di Papua. Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemernitah daerah dalam melaksanakan desentralisasin fiskal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek & Badrudin (2016) menunjukan hasil DAU tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Putrayuda et al., (2017) menunjukan bahwa DAU tidak memberikan pengaruh kepada penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Penggunaan DAU di Papua tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan. Hal ini memberikan arti bahwa DAU masih relative kurang efektif dalam menekan kemiskinan di Papua.

Dana alokasi umum diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk meminimalkan ketimpangan antar daerah. Secara tidak langsung daerah yang mendapatkan DAU sebenarnya adalah daerah yang memililki pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencukupi belanja daerah. Dana alokasi umum tidak berpengaruh dikarenakan oleh Pendapatan Asli Daerah yang rendah sehingga pengeluaran rutin menggunakan dana alokasi umum. Hal ini menjadikan Dana alokasi umum tidak bersinggungan secara langsung dengan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan PAD dan melakukan inovasi dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan.

c. Pengaruh DAK Terhadap Kemiskinan di Papua

Hasil analisis menunjukan bahwa DAK memiliki probabilitas 0,289 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua. Dana alokasi khusus merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amami & Asmara, (2022) menunjukan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Selain itu penelitian Abdullah, (2022) menunjukan hal yang sama yaitu DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Gorontalo.

DAK merupakan dana yang berfokus kepada infrastruktur yang tidak secara langsung bersentuhan dengan kemiskinan. Sehingga hal ini menimbulkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Pemerintah harus melakukan pengalokasian DAK dengan tepat sehingga pembangunan infrastruktur Papua dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Output akhirnya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini akan memberikan dampak kepada kemudahan aktivitas ekonomi di Papua yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua sehingga terbebas dari kemiskinan.

d. Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan di Papua

Hasil analisis menunjukan dana otsus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Hal ini menunjukan bahwa ketika dana otsus ditingkatkan malah memberikan penambahan pada kondisi kemiskinan di Papua. Dapat dikatakan bahwa masih terdapat masalah dalam penerapan dana otsus sehingga tidak dapat menurunkan kemiskinan di Papua. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020) yang menunjukan bahwa dana otonomi khusus belum mampu dalam menurunkan kemiskinan.

Dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang disalurkan kepada beberapa daerah khusus saja. Seharusnya dana otsus ini memberikan kebermanfaatan dalam pelaksanaan desentralisasi fiscal. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyalahgunaan dana sehingga hasilnya tidak efektif dalam penanganan kemiskinan. Penelitian Budiratna & Qibthiyyah (2020) menjelaskan bahwa dana otsus pada pemanfaatannya dilakukan kepada program yang kurang berkualitas sehingga tidak memberikan efek kepada kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dalam menjalankan mandate desentralisasi fiskal harus membenahi dalam pengalokasian dana sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

e. Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan di Papua

Hasil analisi menunjukan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Hal ini menunjukan jika IPM ditingkatkan maka kemiskinan di Papua akan menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhykha et al., (2018) menunjukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa IPM

merupakan indikator kualitas manusia yang meningkat, sehingga dengan peningkatan IPM maka masalah kemiskinan dapat teratasi.

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indikator dalam menilai kualitas manusia. Pada IPM terdapat tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita. Ketika ketiga aspek ini meningkat maka kualitas hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Kondisi IPM Papua harus ditingkatkan lagi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Papua. Kualitas manusia di Papua itu sendirilah yang akan mengeluarkan dari masalah kemiskinan.

f. Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Kemiskinan di Papua

Hasil analisis menunjukan bahwa panjang jalan memiliki probabilitas 0,066 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa infrastruktur panjang jalan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua. Infrastruktur panjang jalan tidak beririsan secara langsung dengan kemiskinan namun pada dasarnya infrastruktur jalan dapat memberikan akses dalam kemudahan aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mantsani et al., (2020) menunjukan bahwa infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Infrstruktur yang masih belum merata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Hal ini menyebabkan kemiskinan yang terjadi masih besar. Selain tidak meratanya infrastruktur kondisi tidak semua kalangan dapat memanfaatkan infrastruktur jalan dengan baik juga masih menjadi masalah. Seperti masih terkendala dengan proses produksi akibat kekurangan modal dan investasi. Hal ini akan memberikan dampak kepada penggunaan infrastruktur yang tidak efektif dan efisien.

g. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Papua

Hasil analisis menunjukan bahwa belanda daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua. Hal ini menunjukan bahwa ketika belanja daerah dinaikan maka kemiskinan di Papua akan menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Isramiwarti et al., (2017) yang menunjukan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Belanja daerah merupakan suatu mandat yang diberikan desentralisasi fiskal dalam asas otonomi daerah. Dimana daerah melaksanakan secara mandiri

pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belanja daerah papua berdampak kepada penurunan kemiskinan. Hal ini menggambarkan bahwa belanja daerah papua sudah selayaknya bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat salah satunya adalah penurunan kemiskinan. Pemerintah papua dalam melaksanakan desentralisasi fiscal harus memanfaatkan dana secara efektif dan efisien. Sehingga dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat terus berjalan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2022). Pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo. Jambura: Economic Education Journal, 4(2), 165–176. https://doi.org/10.37479/jeej.v4i2.14165

Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekobistek, 11, 48–54. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297

Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Media Ekonomi Dan Manajemen, 33(2), 113–123. https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671

Andrianto, I., & Iskandar, D. A. (2019). Program pembangunan dalam konvergensi/divergensii wilayah. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan, 4(1), 13. https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.101

Aziz Sholeh, A., et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. Journal of Management and Creative Business, 2(1), 82–96.

Budiratna, H., & Qibthiyyah, R. M. (2020). Evaluasi atas transfer dana otonomi khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(5), 1–13.

Ghozali, I., & Khoirunurrofik. (2020). Fiscal decentralisation and capital expenditure composition of regional government in Indonesia. International Journal of Trade and Global Markets, 13(1), 81–88. https://doi.org/10.1504/IJTGM.2020.104909

Granado, F. J. A., Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2018). Decentralized governance, expenditure composition, and preferences for public goods. Public Finance Review, 46(3), 359–388.

Gumelar, A. (2021). Analisis pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus: Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). Jurnal Ekonomi-QU, 11(2), 342–364.

Hanif, I., Sharif Chaudhry, I., & Wallace, S. (2014). Fiscal autonomy and economic growth nexus: Empirical evidence from Pakistan. Pakistan J. Soc. Sci. (PJSS), 34, 767–780.

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara, 784–799.

Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Aplikasi Bisnis, 9(15), 173–175.

Israrniwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan dengan belanja daerah sebagai intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011–2015. Pekbis Jurnal, 3(9), 195–199.

Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2010–2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 3(2), 23. https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203

Khusaini, M. (2014). Local government planning and budgeting process: A case of districts and cities in Indonesia. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 7(2), 141–156. https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2014.063190

Kristiawati, et al. (2019). Citra merek persepsi harga dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17), 6(2), 27–36.

Kristin. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 233–234. https://www.academia.edu/download/76624968/pdf.pdf

Lucia, M., Walewangko, E., & Pingkan, I. (2023). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan PAD terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi, 23(7), 37–48.

Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Mimika. Jurnal Kritis, 4, 39–57.

Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telaah Bisnis, 17(2), 81–98.

Mantsani, M., Rumodar, D. A. L., Syukriah, K., & Soegiarto, S. (2020). Determinan kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2017. Seminar Nasional Official Statistics, 2019(1), 466–477. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.17

Mardiansyah, N., Abdul, A. A., & Suharno. (2023). The influence of general allocation funds, special allocation funds, revenue sharing funds, and village funds on poverty in the Special Region of Yogyakarta Province. MYIC, 182–196.

Mudrajad, K. (2004). Otonomi & pembangunan daerah reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang. Erlangga.

Nany, M., Pratama, D. B., & Prasetyaningrum, M. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi, 22(3), 247–261.

Permai, S. D., Christina, A., & Santoso Gunawan, A. A. (2021). Fiscal decentralization analysis that affect economic performance using geographically weighted regression (GWR). Procedia Computer Science, 179(2020), 399–406. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.022

Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamaliah. (2017). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya pada tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2011-2015. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, IX(3), 198–224.

Rasu, K. J., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. (2019). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 20(2), 1. https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019

Sambanis, N., & Milanovic, B. (2014). Explaining regional autonomy differences in decentralized countries. Comparative Political Studies, 47(13), 1830–1855. https://doi.org/10.1177/0010414013520524

Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty–Evidence from Indonesia. Journal of Asian Economics, 81, 101493.

Solomon, B. D. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium, 0042, 526–527. https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104

Tobing, M. (2021). Pengaruh jumlah obyek wisata, tingkat penghunian kamar, dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnomi, 3(2), 127–139. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.263

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Pembangunan ekonomi. Erlangga.